Wabup: Setiap OPD Harus Lebih Responsif Gender

Rabu, 14 April 2021

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai kewajiban bersama. Ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan responsivitas gender dalam kegiatan mereka, baik dalam perencanaan maupun penganggaran. Hal ini diharapkan dapat mendukung program Bupati Pasuruan yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, seperti Perwira dan Satria Mas.

Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi untuk membahas upaya perlindungan perempuan dan anak. Gus Mujib menekankan pentingnya sinergi antar OPD dalam mengoptimalkan program-program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Wakil Bupati juga meminta peran aktif organisasi masyarakat muslim dalam mensinergikan program-program pemerintah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Penggunaan DBH CHT untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan dibahas lebih lanjut bersama Bupati.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Forkopimda Kabupaten Pasuruan, Kepala OPD, Camat, perwakilan RSUD Bangil dan Grati, serta beberapa lembaga dan perusahaan. Forum diskusi berlangsung dengan dinamis dan penuh semangat, menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan.

Melalui upaya bersama, diharapkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.